

Strategi Menurunkan Defisit Anggaran Tahun 2023
Dengan Pendekatan Analisis Proses Hierarki
(Strategy for Reducing the Budget Deficit in 2023
Using a Hierarchical Process Analysis Approach)

Mahir Pratama¹ dan Lisman Manurung²

¹Bagian Televisi dan Radio Parlemen, Setjen DPR RI, Jalan Gatot Subroto,
Ged. Nusantara I, Lantai 2, Sekretariat Jenderal DPR RI, e-mail:

²Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Gedung Prajudi Atmosudirdjo Lantai 2,
Kampus FIA UI Depok, email:

Naskah diterima: 13 Maret 2022

Naskah direvisi: 14 Oktober 2022

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2024

Abstract

COVID-19 requires the Indonesian Government to implement financial policies for economic stability with the issuance of Law 2/2020 providing leeway for the government to project a budget deficit exceeding 3 percent of GDP from 2020-2022. This article wants to look at alternatives and government policy criteria to return the budget deficit to below 3 percent. The method uses the Analytic Hierarchy Process (AHP) with Expert Choice 11 software. Primary data is based on a purposive sampling method on 3 experts, namely APBN Analysts, Policy Economic Researchers and Financial Economic Observers as well as secondary data obtained from projections and realization of the 2020, 2021 and 2022 APBN. Central Statistics Agency and mainstream media with indicators, namely economic growth, exchange rate, inflation, oil prices and interest rates. The results of the AHP calculation sequentially from the high priority weights obtained the criteria for economic growth (0.325), interest rates (0.228), oil prices (0.203), inflation (0.139) and exchange rates (0.106). For alternatives, high priority weightings were obtained, namely tax revenue (0.238), trade balance (0.216), political stability (0.201), priority financing (0.179) and better spending (0.167). The role of the DPR RI is needed to supervise fiscal consolidation which is focused on three strategies, namely increasing revenue, better spending and financing. Keywords: COVID-19, budget deficit, analytic hierarchy process

Abstrak

COVID-19 mengharuskan Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan keuangan untuk stabilitas ekonomi dengan terbitnya Undang-Undang No 2 Tahun 2020 memberikan kelonggaran kepada pemerintah untuk memproyeksikan defisit anggaran melebihi 3 persen dari PDB dari tahun 2020-2022. Tulisan ini ingin melihat alternatif dan kriteria kebijakan pemerintah untuk mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 persen. Metode menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan software Expert Choice 11. Data primer berdasarkan metode purposive sampling pada 3 pakar yaitu Analisis APBN, Peneliti Ekonomi Kebijakan dan Pengamat Ekonomi Keuangan serta data sekunder diperoleh dari proyeksi dan realisasi APBN tahun 2020, 2021 dan 2022, Badan Pusat Statistik dan media mainstream dengan indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, harga minyak dan suku bunga. Hasil perhitungan AHP secara berurutan dari bobot prioritas tinggi diperoleh kriteria pertumbuhan ekonomi (0,325), suku bunga (0,228), harga minyak (0,203), inflasi (0,139) dan nilai tukar (0,106). Untuk alternatif diperoleh pembobotan prioritas tinggi yaitu penerimaan pajak (0,238), neraca perdagangan (0,216), stabilitas politik (0,201), pembiayaan prioritas (0,179) dan spending better (0,167). Diperlukan peran DPR RI untuk mengawasi konsolidasi fiskal yang difokuskan pada tiga strategi, yaitu peningkatan penerimaan, spending better, dan pembiayaan.

Kata kunci: COVID-19, defisit anggaran, *analytic hierarchy process*

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada 12 Maret 2020 (Ciotti et al., 2020). Wabah COVID-19 ini menimbulkan banyak dampak domino tidak saja di bidang kesehatan namun dari bidang ekonomi dan keuangan hampir di seluruh negara dunia, tidak terkecuali Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 5 tahun terakhir sebelum pandemi melanda relatif stabil yakni tahun 2014-2019 sekitar 4,88 sampai 5,17 persen (Badan Pusat Statistik, 2020). Setelah pandemi COVID-19 melanda dunia, tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi diprediksi oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* pada tahun 2020 menjadi 2,4 persen dan Indonesia proyeksi pertumbuhannya juga mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 5 persen menjadi 4,8 persen (Boone, 2020). Namun pada Desember 2020 OECD merevisi proyeksi tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi dunia terjun menjadi minus 4,2 persen dan Indonesia mengalami kontraksi tahun 2020 sebesar minus 2,07 persen dibandingkan tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2021a).

Selain itu, dampak pandemi COVID-19 ini menjadikan penurunan penerimaan negara dari sektor pajak yang menjadi pendapatan utama negara. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun

2020, pendapatan negara diproyeksikan Rp2.233 triliun yang mencakup penerimaan pajak Rp1.865,7 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp367 triliun dan hibah sebesar Rp0,5 triliun (Kementerian Keuangan, 2020). Namun pada realisasinya pendapatan APBN tahun 2020 hanya sebesar Rp1.647,7 triliun atau mengalami penurunan 96,6 persen senilai Rp312,8 triliun jika dibandingkan tahun 2019. Pendapatan tersebut terdiri dari perpajakan senilai Rp1.285,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp343,8 triliun dan hibah senilai Rp18,8 triliun (Kementerian Keuangan, 2020). Di sisi lain, realisasi belanja negara tahun 2020 senilai Rp2.595,4 triliun atau sebesar 94,7 persen dengan komponen belanja pemerintah pusat Rp1.832,9 triliun dan transfer dana ke daerah dan dana desa senilai Rp762,5 triliun. Dengan demikian APBN tahun 2020 mengalami defisit yang sangat tajam yaitu Rp947,6 triliun atau 6,17 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang disebabkan jumlah penerimaan turun tajam dan kebutuhan belanja yang melonjak akibat dari pandemi COVID-19 (Kementerian Keuangan, 2020). Untuk itu dibutuhkan kebijakan fiskal yang mengarah pada pergerakan ekonomi negara dengan menjaga kestabilan harga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerataan pendapatan masyarakat

Defisit yang tajam tersebut sudah di luar ketentuan hukum apabila merujuk pada Undang-Undang No 17 tahun 2003 yang mengatur Keuangan Negara dengan membatasi defisit APBN kurang dari 3 persen dari PDB. Namun kondisi tersebut telah disesuaikan kembali dengan adanya kesepakatan antara pemerintah yang diwakili Kementerian Keuangan dan DPR RI telah menyepakati Perppu No 1 Tahun 2020 menjadi UU No 2 Tahun 2020 untuk menetapkan kebijakan keuangan untuk penanggulangan COVID-19 dan stabilitas ekonomi nasional pada 31 Maret 2020 lalu. Pada pasal 2 Undang-Undang ini menetapkan pemerintah dapat memproyeksikan defisit anggaran melebihi 3 persen dari PDB selama masa penanggulangan COVID-19 dan stabilitas ekonomi nasional hingga tahun 2022 dan tahun 2023 defisit anggaran kembali lagi paling tinggi 3 persen dari PDB (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, 2020).

Untuk itu pemerintah perlu melakukan langkah strategis dalam mengembalikan defisit 3 persen pada tahun 2023. Postur APBN 2022 dan kebijakan yang dilakukan menjadi tahun transisi dan cerminan apakah pemerintah mampu menekan angka defisit anggaran. Kebijakan fiskal dilihat dari sub-sub dalam APBN, dimana secara umum APBN mempunyai dua sisi, yaitu pengeluaran dan penerimaan. Sub APBN tersebut dapat berupa (1) pembiayaan pemerintah dalam konsumsi barang dan jasa; (2) pembiayaan pemerintah untuk belanja pegawai; dan (3) pembiayaan pemerintah dalam bentuk transfer berupa subsidi, pembayaran bunga untuk obligasi, serta bantuan langsung untuk masyarakat. Semua kebutuhan pembiayaan tersebut membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Penerimaan dana pemerintah dapat diperoleh dari (1) berbagai macam pajak; (2) melakukan utang dari bank sentral; (3) menerbitkan obligasi; dan (4) utang luar negeri. Dari sub-sub anggaran tersebut dapat terlihat pengaruh dari kebijakan fiskal dalam perekonomian nasional. Artinya, kebijakan fiskal ini menjadi aliran dan kombinasi dari sub-sub APBN dengan beberapa mekanisme yang dapat memberikan dampak bagi perekonomian secara nasional (Anwar, 2014).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dalam makalah ini berfokus pada (1) alternatif kebijakan apa yang harus ditingkatkan untuk menurunkan defisit anggaran dengan pendekatan *Analysis Hierarchy Process* (AHP) dan (2) strategi pemerintah dalam menurunkan defisit anggaran kurang dari 3 persen terhadap PDB tahun 2023.

TINJAUAN LITERATUR

Menurut Denes et al. (2013) defisit merupakan pengeluaran dikurangi pajak pada tahun tertentu (Denes et al., 2013) dan cenderung negatif serta dihitung bukan dari angka yang absolut namun melakukan pengukuran dalam rasio defisit pada PDB (Juliani, 2021). Untuk mengatasi defisit ini, setidaknya pemerintah mempunyai dua cara, pertama pemerintah harus menaikkan penerimaan dari pajak dan PNBP atau cara yang kedua pemerintah melakukan pinjaman (Fauzyah, 2018). Di luar itu, pemerintah juga dapat melakukan pencetakan uang untuk mengatasi defisit, namun cara ini sangat membahayakan ekonomi dalam negeri karena pencetakan uang baru dengan jumlah yang tidak terkendali dapat menyebabkan inflasi. Menurut Brix dalam *Dealing with Government Fiscal Risk: An Overview* Ratnah (2015) mengatakan ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya defisit anggaran yaitu, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, harga minyak, dan suku bunga.

a) Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Peacock dan Wiseman *dalam* Satrianto (2016) jika produk domestik bruto mengalami peningkatan maka berpengaruh terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi dalam sektor riil dan sektor usaha. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dalam sektor tersebut akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pemerintah pada sektor pajak baik pajak cukai, pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan (Rodrik, 2014). Dengan demikian, pendapatan pemerintah akan meningkat karena sektor utama penerimaan pemerintah berasal dari pajak dan PNB dan meningkatkan ekonomi Indonesia menjadi surplus jika pada kuartal tahun sebelumnya mengalami defisit, dengan peningkatan tersebut akan menyebabkan surplusnya pertumbuhan ekonomi (Satrianto, 2016).

b) Inflasi

Inflasi merupakan proses kenaikan harga secara terus menerus sehingga menurunkan nilai mata uang (Buchmüller et al., 2015). Tentunya dengan kenaikan harga ini akan mengakibatkan lemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat (Wahyuningsih, 2020). Dengan konsumsi yang turun, tentu permintaan di pasar akan mengalami penurunan dan secara linier akan menurunkan jumlah produksi. Artinya, sektor riil mengalami penurunan dan berpengaruh pada PDB serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, lesunya sektor riil membuat pendapatan negara juga mengalami penurunan dan berdampak pada naiknya defisit anggaran dikarenakan pendapatan menurun namun negara harus tetap memenuhi kebutuhan masyarakat.

c) Nilai Tukar

Selain itu, pinjaman luar negeri menjadi pendorong tingginya defisit walaupun menjadi sumber modal pembayaran (Arshad et al., 2014). Sebagai negara berkembang yang melakukan pinjaman luar negeri, Indonesia memiliki masalah jika nilai tukar mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan pinjaman luar negeri tersebut dinilai dengan valuta asing sedangkan untuk pembayarannya (pokok dan bunga) dinilai dengan mata uang rupiah. Jika mata uang rupiah depresiasi terhadap Dollar US, secara otomatis beban pembayaran Indonesia semakin bertambah dari jumlah pinjaman semula. Artinya, meningkatnya jumlah pinjaman mengakibatkan defisit anggaran dari Indonesia.

d) Harga Minyak Dunia

Fluktuasi harga minyak dunia internasional mengikuti aksioma dalam pasar. Kenaikan harga minyak berdampak pada neraca perdagangan serta nilai tukar rupiah. Melakukan impor neto minyak akan mengakibatkan buruknya neraca pembayaran dan mengakibatkan nilai tukar tertekan. Hal ini berpengaruh pada impor dengan harga yang lebih tinggi dan ekspor yang jumlah nilainya berkurang mengakibatkan turunnya pendapatan riil negara. Kenaikan harga minyak dapat menyebabkan inflasi dan meningkatnya defisit anggaran, namun penurunan harga minyak dunia tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan PDB (Trang et al., 2017). Tentunya jika hal ini terjadi akan menyebabkan terdepresiasi nilai tukar rupiah karena nilai tukar dollar US akan naik disebabkan negara yang mengekspor minyak menggunakan dollar US dalam perdagangan. Dengan adanya inflasi, nilai tukar yang menurun serta hasil dari sektor riil yang juga menurun membuat pertumbuhan ekonomi rendah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah berdampak pada penerimaan dan mengakibatkan defisit anggaran.

e) Suku Bunga

Batas atas suku bunga merupakan kebijakan yang dilakukan untuk intervensi pembiayaan kredit dan melindungi konsumen dan masyarakat dari tarif yang terlalu tinggi (Ferrari et al., 2018). Kolerasi suku bunga dan defisit anggaran melalui negarmengeluarkan Surat Berharga Negara atau SBN dalam bentuk Surat Utang Negara atau SUN dan Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN dimana negara menjamin untuk membayar bunga dan pokoknya. Kebijakan ini menimbulkan akumulasi pinjaman dalam bentuk SBN dari institusional bahkan individu (Kitanov, 2019). Apabila suku bungamengalami kenaikan menyebabkan pembayaran bunga dan pokok SBN yang ada akan bertambah. Tentu ini akan meningkatkan beban anggaran negara dan dapat menyebabkan defisit anggaran.

Berdasarkan 5 (lima) kriteria yang dapat mempengaruhi defisit anggaran tersebut, penulis memberikan 5 (lima) alternatif yang dapat dijadikan kebijakan oleh pemerintah untuk menekan defisit anggaran yaitu Pembiayaan Prioritas, Penerimaan Pajak, Spending Better, Neraca Perdagangan dan Stabilitas Politik.

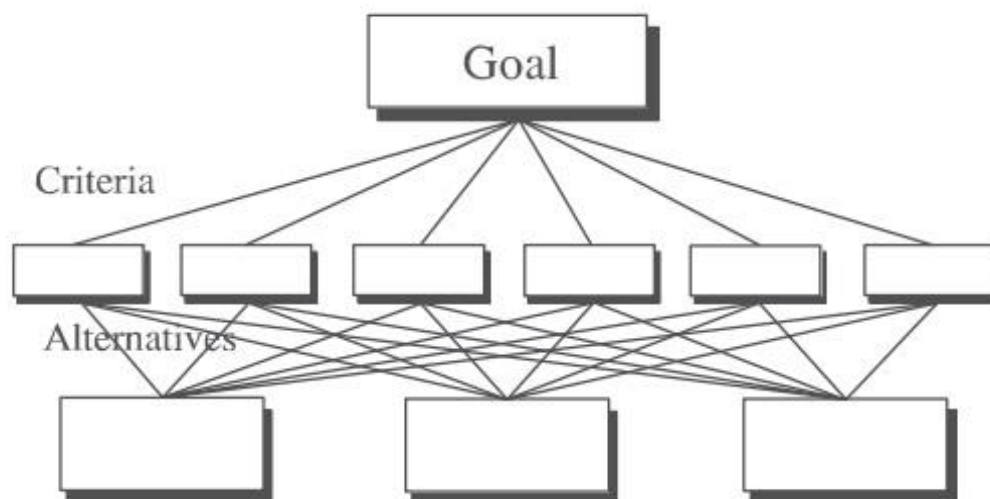
METODE

Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada makalah ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari tiga pakar berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017) dengan jenis *purposive sampel expert* yang artinya teknik sampel membutuhkan seorang ahli dalam bidang tertentu (Moleong, 2016). Jumlah pakar yang diundang sebanyak 3 pakar yang berprofesi sebagai Analis APBN (Pakar 1), Peneliti Ekonomi dan Kebijakan (Pakar 2) dan Pengamat Ekonomi dan Keuangan (Pakar 3). Pemilihan pakar yang hanya tiga dijadikan pertimbangan karena dalam *Analytic Hierarchy Process* hanya membutuhkan sedikit pakar yang dapat mewakili aspek pemerintah maupun praktisi (Saaty, 2013). Ketiga pakar telah mengisi kuesioner dengan masing-masing pertanyaan berjumlah 60 yang terdiri dari 10 pertanyaan yang memberikan *judgment* terhadap 5 kriteria berpasangan yang dibandingkan dengan preferensi 1 tujuan, serta 50 pertanyaan yang memberikan *judgment* terhadap 5 alternatif berpasangan yang dibandingkan dengan preferensi 5 kriteria. Sedangkan data sekunder diperoleh dari proyeksi dan realisasi APBN tahun 2020, 2021 dan 2022, Badan Pusat Statistik dan media *mainstream*.

Metode Analisis

Makalah ini menggunakan pendekatan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dengan mengelola 5 kriteria berdasarkan teori yang dapat mengakibatkan defisit anggaran dan memberikan 5 alternatif yang di *judgment* oleh pakar. AHP merupakan metode untuk menguraikan persoalan yang kompleks dengan membuat struktur hirarki dan memberikan penilaian terhadap kriteria dan alternatif yang ada (Russo & Camanho, 2015) dan menjadi alat pembuat keputusan dalam membandingkan alternatif yang ada (Fountzoula et al., 2021). Menurut Taylor (2014) AHP menjadi metode untuk menentukan skala prioritas dari setiap alternatif dan melakukan pemilihan terhadap kriteria yang terbaik. AHP menggunakan penilaian numerik dalam menentukan peringkat alternatif yang didasari pada kesesuaian alternatif tersebut untuk memenuhi kriteria pengambilan keputusan (Taylor, 2013).



Sumber: Saaty, 2013.

Gambar 1. Level Hirarki AHP

Penilaian ini dilakukan oleh beberapa pakar dan nantinya akan menetapkan variable dan prioritas mana yang paling tinggi dengan cara melakukan AHP (Saaty, 2013). Algoritma AHP pada dasarnya terdiri dari dua langkah (1) menentukan bobot relatif dari kriteria keputusan dan (2) menentukan bobot prioritas dari kriteria dan alternatif yang dihitung (Notohamijoyo et al., 2021). Ini berarti AHP tidak hanya sebagai alat untuk memberikan keputusan yang tepat, namun dapat memberikan penjelasan yang baik terhadap persoalan dan keputusan yang diambil (Handayani, 2015).

Dalam menggunakan AHP terdapat elemen yang dijadikan tujuan (Gambar 1). Di bawahnya terdapat kriteria yang dapat mendukung tujuan tersebut. Pada bagian paling bawah terdapat alternatif-alternatif yang dapat dilakukan untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Kriteria diperoleh dari teori terkait faktor penyebab defisit anggaran sedangkan alternatif didapatkan dari data sekunder yang diperoleh dari proyeksi dan realisasi APBN tahun 2020, 2021 dan 2022, Badan Pusat Statistik dan media *mainstream*. AHP dapat mereduksi persoalan yang kompleks berupa rangkaian dan menganalisis hasilnya.

Dalam makalah pengambilan keputusan ini, penulis melakukan tiga tahapan, yaitu *intelligent*, *modelling*, dan *choice*. Tahap *intelligent* dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari data sekunder berupa proyeksi dan realisasi APBN tahun 2020, 2021 dan 2022, Badan Pusat Statistik dan media *mainstream*. Pada tiga tahun tersebut defisit anggaran diberikan kelonggaran melebihi 3 persen akibat dari pandemi COVID-19. Pada tahap *Modelling* dilakukan membuat hierarki dari tujuan, kriteria dan alternatif dari model AHP Saaty. Dan pada tahap *Choice*, dilakukan perhitungan bobot dengan perbandingan berpasangan pada setiap kriteria dan alternatif menggunakan program Expert Choice 11. Dalam melakukan pembobotan nilai (Tabel 1) ada skala mutlak yang telah ditetapkan dimana skala ini mulai dari angka 1 sampai angka 9. Angka 1 bernilai sama penting antar kriteria atau alternatif yang dibandingkan. Angka 2 sampai 9 secara berurutan menunjukkan tingkat prioritas yang lebih besar dari kriteria atau alternatif yang dibandingkan.

Tabel 1. Skala Pembobotan Nilai

<i>Intensif of Importance</i>	<i>Definition</i>	<i>Explanation</i>
1	<i>Equal importance</i>	<i>Two activities contribute aually to the objective</i>
2	<i>Weak or slight</i>	
3	<i>Moderate importance</i>	<i>Experience and judgement slightly favour one activity over another</i>
4	<i>Moderate plus</i>	
5	<i>Strong importance</i>	<i>Experience and judgement strongly favour one activity over another</i>
6	<i>Strong plus</i>	
7	<i>Very strong or demonstrated importance</i>	<i>An activity is favoured very strongly over another; its dominance demonstrated in practice</i>
8	<i>Very, very strong</i>	
9	<i>Extreme importance</i>	<i>The evidence favouring one activity over another is of the highest possible order of affirmation</i>

Sumber: Saaty, 2013

Setelah melakukan pembobotan berdasarkan Tabel 1, selanjutnya membandingkan dan membuat matriks penilaian. Pada level kriteria akan saling dibandingkan berdasarkan nilai pembobotan dan begitu juga pada level alternatif. Penggunaan AHP harus memerhatikan inkonsistensi untuk menetapkan prioritas terhadap kriteria dan alternatif untuk mendapatkan hasil yang akurat. AHP menghitung inkonsistensi secara keseluruhan dari berbagai sistesis yang ada. Untuk membuat keputusan sangat penting melihat konsistensi dari kriteria dan alternatif yang ada berdasarkan hasil dari perhitungan konsistensi yang rendah atau tinggi (Tielung & Wibowo, 2016).

Consistency Index (CI) diperoleh melalui persamaan:

$$CI = \frac{\lambda_{maks} - n}{n - 1} \dots\dots\dots (1)$$

Consistency Ratio (CR) diperoleh melalui persamaan:

$$CR = \frac{CI}{IR} \dots\dots\dots (2)$$

Di mana:

- λ_{maks} : eigen value
- n : banyaknya elemen
- IR : *Index Random Consistency*

Nilai λ maks diperoleh dari persamaan:

$$\lambda_{maks} = \frac{\sum_{i=1}^n a_{ii}.p_i}{p1} \dots\dots\dots (3)$$

Di mana:

- a_{ii} : nilai perbandingan dari elemen 1 sampai ke- i
 p_i : nilai prioritas dari elemen ke- i

Nilai *Index Random Consistency* (IR) dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai IR

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IR	0	0	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Sumber: Saaty, 2013

Pada perhitungan nilai inkonsistensi rasio antar matriks yang berpasangan, tingkat inkonsistensi yang masih bisa diterima paling rendah 0,1 atau 10 persen ke bawah (Ho & Ma, 2018). Jika dalam perhitungan terdapat CR kurang atau sama dengan 0,1 hasil perhitungan tersebut dapat diterima. Namun, jika melebihi 0,1 hasil dari perhitungan AHP tidak valid dan dilakukan revisi penilaian karena nilai inkonsistensi terlalu tinggi sehingga dapat menjurus pada kesalahan. Menurut Kulakowski (2015) ada tiga cara untuk melakukan revisi penilaian, yaitu (1) mencari penilaian yang paling tidak konsisten pada matriks, (2) menemukan nilai yang dapat diubah, dan (3) meminta penilaian ulang dari ahli (Kulakowski, 2015).

Dalam makalah ini menggunakan Expert Choise (EC) versi 11. EC merupakan program yang digunakan untuk membantu menentukan pengambilan keputusan dalam metode AHP. Pada EC ini memiliki fitur dalam menginput tujuan, menginput *judgment* yang telah dilakukan *expert* (Gupta & Vijayvargy, 2021) fitur kombinasi dengan gabungan semua *judgment* serta penyajian data dengan beberapa versi. Kemampuan dari EC ini didasarkan pada metode proses hirarki analitik, sehingga diperoleh analisis yang lebih rinci untuk setiap pakar dari hasil matriks yang dibuat (Bagheri et al., 2021). Untuk inkonsistensi rasio secara otomatis tertera pada setiap matriks baik kriteria, alternatif atau pun jumlah keseluruhan dari tujuan yang dihitung.

Dalam proses perhitungan menggunakan Expert Choice 11, dilakukan penginputan tujuan (*goal*) yang ingin diputuskan. Selanjutnya membuat kriteria dari tujuan tersebut dengan menambahkan *nodes* sesuai dengan jumlah yang ada pada struktur AHP. Selanjutnya menginput alternatif-alternatif yang ada pada struktur AHP. Setelah semua alternatif diinput, langkah selanjutnya membuat tabel partisipan, yaitu mengisi data dari pakar yang telah memberikan *judgment* dari pertanyaan yang diajukan. Terdapat 3 pakar yang telah memberikan penilaian dan masing-masing hasilnya akan diinput ke dalam matriks perbandingan. Untuk setiap pakar terdapat 6 matriks perbandingan. Matriks tersebut terdiri dari 1 matriks perbandingan antara kriteria yang mempunyai pengaruh terhadap tujuan yaitu strategi dalam menurunkan defisit anggaran. Untuk 5 matriks lainnya terdiri dari matriks perbandingan antara alternatif untuk 5 kriteria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

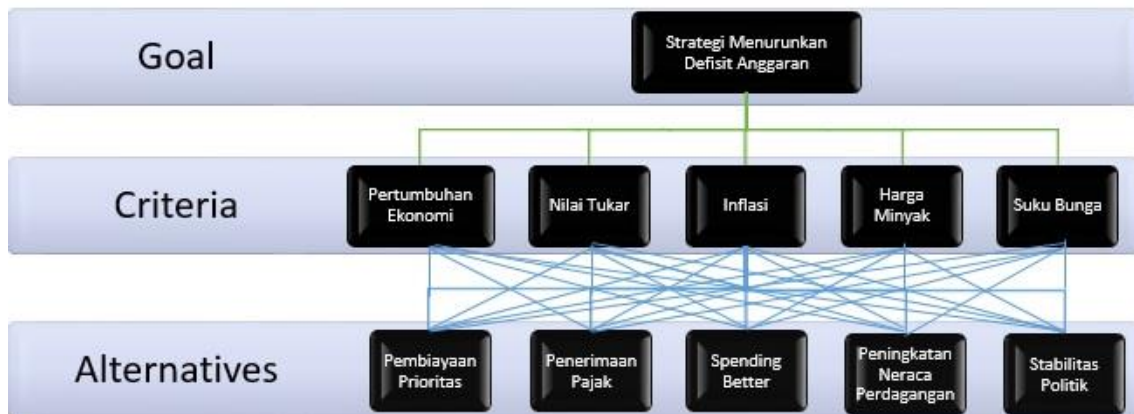
Pada pengumpulan data dan informasi berupa proyeksi dan realisasi APBN tahun 2020, 2021, dan 2022 yang menjadi tahun relaksasi defisit anggaran akibat dari pandemi COVID-19 diperoleh kriteria dan alternatif seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Kriteria dan Alternatif

No	Kriteria	Alternatif
1	Pertumbuhan Ekonomi	Pembiayaan Prioritas
2	Nilai Tukar	Penerimaan Pajak
3	Inflasi	Spending Better
4	Harga Minyak	Neraca Perdagangan
5	Suku Bunga	Stabilitas Politik

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Pada tahap ini, tujuan, kriteria dan alternatif yang diperoleh dibuat hierarki keputusan berdasarkan model Saaty (2013).



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Gambar 2. Bagan AHP

Gambar 2 menunjukkan tujuan untuk menurunkan defisit anggaran dipengaruhi oleh 5 kriteria yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, harga minyak dan suku bunga. Dari masing-masing 5 kriteria tersebut saling memengaruhi untuk 5 alternatif yang ada yaitu pembiayaan prioritas, penerimaan pajak, *spending better*, neraca perdagangan dan stabilitas politik. 5 alternatif keputusan tersebut dapat menjadi strategi pemerintah dalam menekan defisit anggaran.

Dalam perhitungan AHP menggunakan software EC, terdapat 1 matriks perbandingan antara 5 kriteria yang mempengaruhi tujuan dan 5 matriks perbandingan lainnya antara alternatif-alternatif untuk 5 kriteria (Gambar 3)

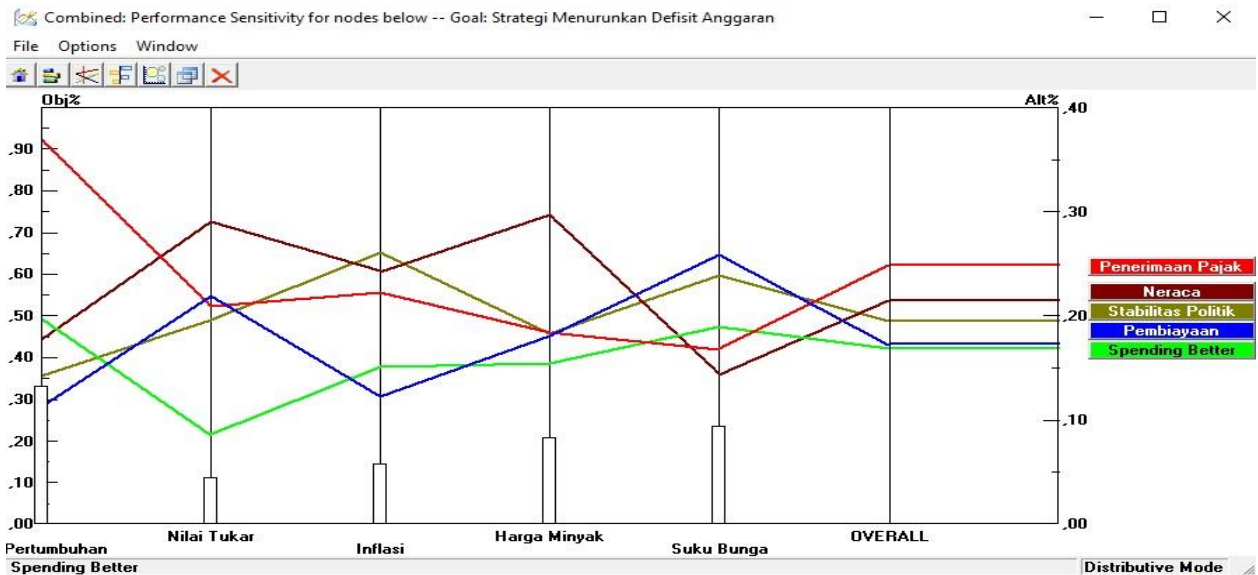
	Pertumbuh	Nilai Tukar	Inflasi	Harga Mim	Suku Bung
Pertumbuhan Ekonomi		5,0	5,0	5,0	5,0
Nilai Tukar			2,0	8,0	6,0
Inflasi				6,0	6,0
Harga Minyak					1,0
Suku Bunga					

Incon: 0,08

Sumber: Pengolahan Data, 2022

Gambar 3. Matriks *judgement* untuk Goal oleh Pakar 1

Dari Gambar 3 terlihat sebuah matriks perbandingan kriteria-kriteria yang mempengaruhi tujuan oleh Pakar 1. Di mana hasil pembobotannya diperoleh pertumbuhan ekonomi (0,140), nilai tukar (0,038), inflasi (0,053), harga minyak (0,391) dan suku bunga (0,377) dengan nilai inkonsistensi rasio sebesar 0,08 atau 8 persen.



Sumber: Pengolahan Data, 2022

Gambar 4. Grafik Hasil Kombinasi Perhitungan AHP

Pada Gambar 4 hasil dari perhitungan AHP dengan semua pakar, diperoleh hasil untuk alternatif kebijakan terhadap 5 kriteria secara berurutan yaitu Penerimaan Pajak (0,238), Neraca Perdagangan (0,216), Stabilitas Politik (0,201), Pembiayaan Prioritas (0,179) dan Spending Better (0,167). Selanjutnya, Grafik pada gambar.4 juga menunjukkan kriteria-kriteria yang memengaruhi tujuan. Secara berurutan data tersebut menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi (0,325), Suku Bunga (0,228), Harga Minyak (0,203), Inflasi (0,139) dan Nilai Tukar (0,106). Secara lebih jelas, data akan disajikan dalam Tabel 4 untuk melihat hasil perhitungan antar alternatif dan kriteria. Berikut hasil pembobotan untuk 3 Pakar menggunakan Expert Choice 11 baik untuk 1 matriks tujuan dan 5 matriks kriteria (Tabel 4).

Tabel 4. Pembobotan Matriks Tujuan dan Kriteria Berdasarkan Struktur AHP

Pakar	Tujuan: Menurunkan Defisit Anggaran					Inkonsistensi Rasio	Kriteria Berpengaruh Pada Defisit Anggaran					Inkonsistensi Rasio
	Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Tukar	Inflasi	Harga Minyak	Suku Bunga		Pembiayaan Prioritas	Penerimaan Pajak	Spending Better	Neraca Perdagangan	Stabilitas Politik	
Analisis APBN (Pakar 1)	0,140	0,038	0,053	0,391	0,377	0,08	0,251	0,124	0,136	0,271	0,218	0,05
Peneliti Ekonomi Dan Kebijakan (Pakar 2)	0,517	0,112	0,145	0,081	0,145	0,02	0,208	0,262	0,197	0,210	0,123	0,04
Pengamat Ekonomi dan Keuangan (Pakar 3)	0,309	0,167	0,225	0,163	0,137	0,03	0,140	0,321	0,140	0,176	0,224	0,02
Combined	0,325	0,106	0,139	0,203	0,228	0,02	0,179	0,238	0,167	0,216	0,201	0,02

Sumber: Pengolahan Data, 2022

Tabel 4 menunjukkan hasil dari perbandingan berpasangan dari matriks yang telah diolah menggunakan Expert Choice 11 diikuti perhitungan inkonsistensi rasio untuk setiap matriks. Inkonsistensi rasio yang diperoleh menunjukkan angka di bawah 0,1 atau 10 persen yang artinya perhitungan ini sudah akurat dan konsisten. Selanjutnya, setelah perhitungan dilakukan dari setiap pakar, penulis melakukan perhitungan dari hasil setiap pakar digabung untuk mendapatkan hasil akhir dari setiap kriteria dan alternatif. Dari hasil perhitungan *combined* secara berurutan dari bobot prioritas tinggi diperoleh kriteria pertumbuhan ekonomi (0,325), suku bunga (0,228), harga minyak (0,203), inflasi (0,139) dan nilai tukar (0,106). Ini artinya pertumbuhan ekonomi dan suku bunga mempunyai pengaruh paling besar pada defisit anggaran. Perlu perhatian yang lebih besar oleh pemerintah pada dua kriteria ini jika ingin menurunkan defisit anggaran pada tahun 2023. Selanjutnya untuk alternatif diperoleh pembobotan prioritas tinggi yaitu penerimaan pajak (0,238), neraca perdagangan (0,216), stabilitas politik (0,201), pembiayaan prioritas (0,179) dan *spending better* (0,167). Artinya, alternatif penerimaan pajak dan neraca perdagangan harus menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas suku bunga agar defisit anggaran tahun 2023 dapat diturunkan sesuai dengan amanat undang-undang.

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Defisit Anggaran

Pada realisasi APBN tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 2,07 persen terhadap PDB. Kontraksi yang dalam ini dipicu kontraksinya dari sisi produksi yang ada pada usaha transportasi dan industri pergudangan sebesar 15,04 persen. Dari sektor ekspor mengalami hal yang sama yakni kontraksi sebesar 7,70 persen. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif, pada triwulan I tumbuh 0,74 persen, triwulan II tumbuh begitu baik 7,07 persen dan pada triwulan III tumbuh 3,51 persen terhadap PDB. Sumber: Kemenkeu APBN 2022



Gambar 5. Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)

Gambar 5 menunjukkan *reborn* yang paling baik di triwulan II tahun 2021 di sebagian negara G20 dan juga kawasan ASEAN. Hal ini didukung dengan adanya upaya vaksinasi di berbagai negara tersebut dan juga dipengaruhi oleh efek kontraksi yang dalam pada triwulan II tahun 2020.

Pada tahun 2022, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Kondisi ini dilihat salah satunya dengan performa pada tahun 2021 setidaknya pada tiga triwulan sekitar 3,7 sampai 4,5 persen. Kondisi pemulihan ekonomi diproyeksikan akan berlanjut tahun 2022, dengan konsumsi rumah tangga yang sudah membaik yaitu 5,9 persen pada kuartal II, investasi 7,5 persen pada kuartal II dan konsumsi pemerintah sudah menyentuh 8,1 persen pada kuartal II tahun 2021. Selain itu, berbagai langkah pengendalian COVID-19 dan penguatan reformasi struktural akan tetap menjadi prioritas utama pada APBN 2022. Akan tetapi, hal yang perlu menjadi catatan, penyebaran varian baru tetap menjadi faktor utama resiko yang tetap diantisipasi.

Jika pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dapat dijaga tetap tumbuh diatas 4 persen dan PDB pengeluaran terus tumbuh positif, seperti konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah hal ini akan menurunkan defisit anggaran tahun 2023, karena pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan berbalik dengan defisit anggaran (Ratnah, 2015). Pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak terhadap defisit APBN, jika PDB meningkat akan berpengaruh pada peningkatan aktivitas ekonomi yang paling utama di sektor riil dan UMKM. Dengan kembalinya aktifitas ekonomi masyarakat tentunya penerimaan dari sektor pajak juga mengalami peningkatan dan berpengaruh pada turunnya defisit anggaran.

Nilai Tukar terhadap Defisit Anggaran

Pada tahun 2020 nilai tukar rerata rupiah mengalami pelemahan diangka 2,66 persen ke Rp14.525 per USD dibandingkan pada tahun 2019 yang berada pada level Rp14.139 per USD. Rupiah mengalami

pelemahan yang sangat dalam saat awal pandemi dinyatakan masuk ke Indonesia. Pada 23 Maret 2020, rupiah sempat menyentuh angka Rp16.575 per USD (Faqir, 2021). Sedangkan pada tahun 2021, rupiah masih bisa dikendalikan di angka Rp14.350 terhadap 1 USD walaupun pada kuartal II mendapatkan tantangan dengan adanya stimulus yang dilakukan presiden Amerika Serikat, Joe Biden, untuk menambah belanja fiskal sebesar USD1,9 triliun (Faqir, 2021). Namun pemerintah melalui Bank Indonesia melakukan beberapa antisipasi yaitu melakukan penyesuaian imbal hasil dengan pemerintah untuk Surat Berharga Negara. Langkah ini tentu dapat membuat rupiah fluktuatif, namun di sisi lain perlahan akan membuat masuk modal asing dan menjadi pendorong rupiah untuk tetap stabil. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian dengan tetap bekerjanya pasar melalui efektifitas moneter dan tetap menjaga tersedianya likuiditas di pasar.

Jika dicermati pada tahun 2020, nilai rupiah pada level Rp14.525 dan tahun 2021 sampai Desember diprediksi pada level Rp14.350 per USD maka rupiah dikatakan menguat dan dapat menurunkan defisit anggaran. Hal ini tentu berbanding lurus dengan defisit anggaran yang telah dibahas sebelumnya, defisit anggaran 2020 berada pada angka 6,34 persen dan berhasil turun pada angka 5,2 sampai 5,4 persen (Q1, Q2, Q3 2021) terhadap PDB. Sehingga pemerintah memproyeksikan nilai tukar bisa terjaga pada level Rp14.350 per USD tahun 2022. Akan tetapi, pemerintah dan Bank Indonesia terus mengantisipasi tekanan pasar keuangan dunia seiring dengan normalisasi perekonomian Amerika yang diprediksi akan lebih cepat dari perhitungan serta mengantisipasi intervensi dari The Fed.

Di luar itu, tahun 2022 pemerintah dapat melakukan peningkatan terhadap komoditas ekspor dan menekan impor. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus pada bulan Juni 2021 baik dari bulan ke bulan (*mtm*) dan dari tahun ke tahun (*yoy*). Surplus tersebut terjadi selama 14 bulan berturut-turut mulai bulan Mei 2020 hingga Juni 2021. Surplus ini berasal dari komoditas nonmigas seperti lemak dan nabati, besi, baja dan bahan bakar mineral (Limanseto, 2021). Peningkatan ini menunjukkan kegiatan ekonomi Indonesia semakin membaik di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, kedepan pemerintah dapat mengoptimalkan ekspor batubara yang saat ini mengalami permintaan yang tinggi dari negara lain.

Inflasi terhadap Defisit Anggaran

BPS merilis tingkat inflasi Indonesia tahun 2020 sebesar 1,68 persen. Angka ini diluar target Bank Indonesia yakni ± 3 persen. Penyebabnya lemahnya daya beli masyarakat. Selain itu penyebab inflasi tahun 2020 dari sektor perawatan pribadi dan jasa senilai 0,35 persen. Penyumbang lainnya dari sektor makanan, minuman dan tembakau senilai 0,9 persen dan restoran senilai 0,2 persen. Sedangkan menurut data BPS untuk tingkat inflasi sepanjang 2021 (Januari – November) senilai 1,30 persen serta untuk inflasi dari bulan November 2021 dengan November 2020 senilai 1,75 persen (Badan Pusat Statistik, 2021b). Sementara itu, untuk tahun 2022 pemerintah mematok inflasi pada tingkat 3 persen (*yoy*). Laju inflasi tahun 2022 jika dibanding dengan tahun 2021 akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat akibat dari pemulihan pandemi COVID-19. Untuk mengendalikan laju inflasi tetap pada angka 3 persen, pemerintah tentu harus melakukan upaya kombinasi antara sektor riil, kebijakan fiskal dan moneter. Upaya kombinasi ini ditujukan untuk menjaga supply produksi dan menjaga daya beli masyarakat dari segi permintaan.

Tingkat inflasi harus tetap rendah dan stabil mengingat Indonesia saat ini masih dalam pemulihan ekonomi. Tingkat inflasi memiliki hubungan yang linier dengan defisit anggaran. Artinya, jika inflasi dengan naiknya harga secara otomatis akan biaya pembangunan dan program yang telah dirancang pemerintah akan mengalami kenaikan dan disisi lain alokasi anggaran tidak berubah. Jika laju inflasi tidak bisa dikendalikan, maka akan ada APBN-P di pertengahan tahun untuk menyesuaikan kembali alokasi anggaran dan menyebabkan peningkatan terhadap defisit anggaran.

Jika dilihat proporsi penghasilan konsumen yang dialokasikan untuk konsumsi pada Juli 2021 sebesar 74,6 persen, sedangkan rata-rata penghasilan konsumen yang disimpan mengalami peningkatan 15,1 persen (*mtm*). Ini mengindikasikan bahwa masyarakat mengurangi tingkat konsumsi dan menaikkan jumlah tabungan terutama saat tingkat penyebaran virus berada pada level yang tinggi. Untuk itu, tahun 2022 dan 2023 efektifitas vaksin dan kelonggaran mobilitas masyarakat menjadi kunci untuk memulihkan daya beli masyarakat dan berdampak pada tingkat inflasi dan defisit anggaran kedepannya.

Harga Minyak terhadap Defisit Anggaran

Harga minyak mentah pada APBN 2020 USD30 per barel. Namun proyeksi ini mengalami fluktuasi yang sangat tajam dimana menyentuh titik terendah untuk West Texas Intermediate atau WTI pada 21 April 2020 pada level USD9,12 per barel dan jenis minyak brent pada level USD11,58 per barel. Namun, pada bulan selanjutnya harga minyak tersebut mengalami kenaikan sampai pada harga yang paling tinggi di 24 Desember 2020 WTI sebesar USD48,23 per barel dan brent USD50,88 per barel. Tentu lonjakan harga minyak pada tahun 2020 diluar proyeksi pemerintah sebesar USD30 per barel. Untuk tahun 2021 sendiri, harga minyak dunia diproyeksikan pemerintah pada level USD55 - USD65 per barel.

Data yang diperoleh dari *id.investing.com* menunjukkan pergerakan harga minyak dunia tahun 2021 mulai awal Januari sampai Agustus 2021 menunjukkan fluktuasi yang meningkat. Data tanggal 23 November 2021 menunjukkan harga minyak menyentuh USD82,33 per barel (*id.investing.com*, 2021). Keadaan ini jauh dari proyeksi pemerintah yang mematok harga tertinggi untuk harga minyak pada level USD65 per barel. Tentu dengan terus naiknya harga minyak, pemerintah harus menambal anggaran untuk kekurangan BBM dan jumlah subsidi yang telah melebihi perkiraan penghematan pemerintah, dengan demikian hal tersebut membuat defisit anggaran yang tidak sedikit. Mengingat pemerintah melakukan impor minyak untuk menutupi kekurangan konsumsi dalam negeri, tentu naiknya harga minyak dunia ini akan memengaruhi performa neraca perdagangan dan nilai tukar, sehingga pemerintah harus mengantisipasinya pada tahun 2022. Pemerintah mematok harga minyak dunia tahun 2022 pada harga USD63 per barel dengan pertimbangan pengaruh pemulihan permintaan dunia, meningkatnya jumlah produksi, dan juga perkembangan energi alternatif yang kian di galakkan. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan *lifting* minyak dan gas dengan berupaya mendorong dan mempercepat proyek migas baru, meningkatkan aktivitas pengeboran, serta tetap melakukan *maintenance* terhadap sumur bor eksisting untuk menjaga level produksi.

Suku Bunga terhadap Defisit Anggaran

Pada tahun 2020 Bank Indonesia menetapkan suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,4 persen. Namun dengan adanya pandemi COVID-19, Bank sentral menurunkan BI 7-days *reserve repo rate* (BI7DRR). Upaya ini dilakukan untuk menstabilkan nilai tukar dan upaya untuk pemulihan ekonomi. Terhitung tahun 2020, Bank Indonesia sudah empat kali menurunkan BI7DRR sejumlah 125 bps dari 5 persen pada Januari 2020 menjadi 4,75 pada akhir Februari, turun lagi menjadi 4,5 persen pada Maret 2020. Pada pertengahan Juni 2020 kembali turun menjadi 4,25 persen disusul pertengahan Juli 2020 turun menjadi 4 persen. Kemudian pada pertengahan November kembali turun ke level 3,75 persen hingga akhir tahun. Hingga pada Agustus 2021 BI kembali menurunkan BI7DRR menjadi 3,5 persen dan menjadi terendah yang pernah terjadi. Sementara itu pada tahun 2022 pemerintah mematok tingkat SUN 10 tahun pada level 6,82 persen yang diharapkan mampu terjaga dengan dukungan dari Bank Indonesia untuk menopang trend pemulihan kegiatan ekonomi dunia dan domestik.

Peran DPR dalam Konsolidasi Fiskal Menurunkan Defisit Anggaran 2023

Disiplin fiskal harus ditekan agar defisit anggaran bisa di bawah angka 3 persen terhadap PDB sesuai amanat UU No 2 tahun 2020. Kelonggaran defisit yang telah diberikan selama tiga tahun yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022 telah berpengaruh meningkatnya hutang negara. Untuk memastikan defisit anggaran kembali di bawah 3 persen pada tahun 2023, DPR RI melalui fungsi anggaran dan pengawasan di Badan Anggaran perlu memastikan pemerintah melakukan sejumlah kebijakan yang bertahap dalam bentuk konsolidasi fiskal. Kebijakan ini dilakukan untuk menurunkan defisit anggaran dan juga akumulasi hutang. Menurut OECD (2011) defisit anggaran bisa ditekan melalui pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan dan menekan biaya belanja (Riem, 2016). DPR RI perlu menjalankan fungsi pengawasan terhadap konsolidasi fiskal yang harus dijalankan pemerintah. Konsolidasi tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu (1) menekan anggaran pengeluaran seperti biaya operasional dan menahan beberapa program atau proyek yang bersifat dapat ditunda dan (2) melakukan langkah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Dengan demikian, konsolidasi fiskal nantinya dalam difokuskan pada tiga strategi yaitu strategi meningkatkan penerimaan, strategi *spending better* dan strategi pembiayaan.

Dalam strategi meningkatkan pendapatan tentu pemerintah harus memperluas *tax based* atau basis pajak. Dengan diundangkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP menjadi

landasan pemerintah untuk memperluas dan meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari pajak karbon, kenaikan tarif untuk pajak pertambahan nilai, pajak sektor *e-commerce*. Selain itu pemerintah dapat mengusulkan pajak pada minuman yang mempunyai kadar gula tinggi dan bersoda mengingat BPJS kesehatan sudah menanggung penyakit diabetes. Dari segi cukai juga pemerintah tahun 2022 telah menaikkan cukai rokok untuk mengurangi konsumsi rokok dan tentunya menaikkan pendapatan negara.

Selanjutnya, strategi *spending better* menjadi langkah yang harus dilakukan pemerintah dengan mengaplikasikan *zero based budgeting* dengan tujuan efisiensi anggaran dasar, melakukan program prioritas dan memusatkan pada hasil kinerja. Skema ini dilakukan untuk penghematan dalam pengurangan aktivitas yang tidak produktif. Skema ini juga dapat mengurasi inflasi anggaran dan memiliki tingkat akurasi anggaran yang baik karena setiap program atau pembiayaan harus dihitung dari awal dan *realtime* untuk semua biaya belanja. Terakhir, strategi pembiayaan yang dikelola dengan *prudent* dan *countercycling*. Menjadikan hutang sebagai instrumen pembatas dan mengutamakan selektifitas dalam penyertaan modal negara untuk BUMN. Ketiga strategi tersebut perlu mendapatkan pengawasan langsung dari DPR RI baik dari segi penyusunan RAPBN melalui legislasi dan anggaran maupun pengawasan pelaksanaan program kerja di lapangan yang sesuai dengan ketentuan alokasi anggaran.

KESIMPULAN

Dari hasil perhitungan AHP, upaya pemerintah menurunkan defisit anggaran tahun 2023 dapat difokuskan pada meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan neraca perdagangan. Dalam upaya menurunkan defisit anggaran pada tahun 2023 kembali pada angka 3 persen, pemerintah perlu menggalakkan sektor investasi dan perdagangan serta meningkatkan ekspor dalam meningkatkan kualitas dari produk dalam negeri agar dapat bersaing. Untuk APBN transisi tahun 2022 ke tahun 2023 dengan kembali pada defisit 3 persen, DPR RI perlu mengawal kebijakan fiskal yang kontraksikal dan reformasi fiskal yang dapat membentuk postur APBN yang resiliensi.

REKOMENDASI

1. Pemerintah harus fokus pada peningkatan pajak dengan memanfaatkan teknologi dan analisis data untuk meminimalkan penghindaran pajak dan memperluas basis pajak. Mengoptimalkan undang-undang perpajakan yang menargetkan sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan signifikan dan sumber daya yang belum dimanfaatkan, seperti layanan digital dan konten creator.
2. Selain itu, mengimplementasikan pendekatan penganggaran berbasis nol (*zero-based budgeting*). Prioritaskan pengeluaran pada proyek-proyek yang menawarkan keuntungan ekonomi tinggi dan potensi untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan.
3. Terakhir, pemerintah harus mendukung industri yang berorientasi ekspor melalui subsidi dan insentif pajak untuk memperbaiki neraca perdagangan. Menerapkan strategi substitusi impor untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang asing dan memperkuat industri lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kitanov, Y. (2019). *Are risk free government bonds risk free indeed*. January.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian* (35th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan* (S. Y. Ratri (ed.); I). Alfabeta.
- Wahyuningsih, T. (2020). *Ekonomi Publik* (2nd ed.). Rajawali Pers.

Jurnal & Working Paper

- Anwar, K. (2014). Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro Indonesia (Tahun 1993-2007). *Jejaring Administrasi Publik*, VI, No 2(2), 588–603.
- Arshad, Z., Zaid, M., & Latif, A. (2014). Relative Effectiveness of Foreign Debt and Foreign Aid on Economic Growth in Pakistan. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 55(2), 254–268.

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Agustus 2020* (123 Agustus). Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2021a). *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021b). Inflasi Perkembangan Indeks Harga Konsumen. In *Bps.go.Id* (Vol. 19, Issue 27).
- Bagheri, M., Zaiton Ibrahim, Z., Mansor, S., Abd Manaf, L., Akhir, M. F., Talaat, W. I. A. W., & Beiranvand Pour, A. (2021). Application of Multi-Criteria Decision-Making Model and Expert Choice Software for Coastal City Vulnerability Evaluation. *Urban Science*, 5(4), 84. <https://doi.org/10.3390/urbansci5040084>
- Buchmüller, W., Dudas, E., Heurtier, L., Westphal, A., Wieck, C., & Winkler, M. W. (2015). Challenges for large-field inflation and moduli stabilization. *Journal of High Energy Physics*, 2015(4), 0–40. [https://doi.org/10.1007/JHEP04\(2015\)058](https://doi.org/10.1007/JHEP04(2015)058)
- Ciotti, M., Ciccozzi, M., Terrinoni, A., Jiang, W. C., Wang, C. Bin, & Bernardini, S. (2020). The COVID-19 pandemic. *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, 57(6), 365–388. <https://doi.org/10.1080/10408363.2020.1783198>
- Denes, M., Eggertsson, G. B., & Gilbukh, S. (2013). Deficits, Public Debt Dynamics and Tax and Spending Multipliers. *Economic Journal*, 123(566). <https://doi.org/10.1111/eoj.12014>
- Faqir, A. (2021). *Sepanjang 2020, Nilai Tukar Rupiah Melemah 2,66 Persen*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4468364/sepanjang-2020-nilai-tukar-rupiah-melemah-266-persen>
- Ferrari, A., Masetti, O., & Ren, J. (2018). Interest Rate Caps: The Theory and The Practice. *Interest Rate Caps: The Theory and The Practice*, April. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-8398>
- Fountzoula, C., Aravossis, K., & National Technical University of Athens. (2021). Analytic Hierarchy Process and its Applications The Public Sector: A review. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25(6), 1–15. <https://www.abacademies.org/articles/Analytic-hierarchy-process-and-its-applications-in-the-public-sector-a-review-1528-2635-25-6-981.pdf>
- Gupta, S., & Vijayvargy, L. (2021). Selection of Green Supplier in Automotive Industry: An Expert Choice Methodology. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 795(1), 0–10. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/795/1/012036>
- Handayani, R. I. (2015). Pemanfaatan Aplikasi Expert Choice Sebagai Alat Bantu Dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, 11(1), 53–59.
- Ho, W., & Ma, X. (2018). The state-of-the-art integrations and applications of the analytic hierarchy process. *European Journal of Operational Research*, 267(2), 399–414. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.09.007>
- Id.investing.com. (2021). *Minyak Mentah WTI Berjangka*. Id.Investing.Com. <https://id.investing.com/commodities/crude-oil-streaming-chart>
- Juliani, H. (2021). Peranan Pinjaman Luar Negeri Dalam Mengatasi Defisit Anggaran Negara. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(2), 17–18. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/11389/5813>
- Kementerian Keuangan. (2020). *Apbn 2020*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>
- Kuřakowski, K. (2015). Notes on order preservation and consistency in AHP. *European Journal of Operational Research*, 245(1), 333–337. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.03.010>
- Limanseto, H. (2021). *Surplus Neraca Perdagangan Tunjukkan Keberlanjutan Pemulihan Sektor Ekonomi*.
- Notohamijoyo, A., Huseini, M., Koestoer, R. H., & Fauzi, S. (2021). Membangun Skema Ekolabel Perikanan Nasional sebagai Wujud Perlindungan terhadap Hak Nelayan dan Sumber Daya Perikanan [Building the National Fisheries Ecolabeling Scheme as Form of Protection of Fishermen Rights and Fisheries Resources]. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 11(16), 27–38. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/1493>
- Ratnah. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Defisit APBN Indonesia. *Journal Economix*, 3(2), 1–11.
- Riem, M. (2016). Fiscal consolidation. *IEMCESifo Forum*, 17(1), 43–47. https://doi.org/10.1787/eco_studies-2012-5k8zs3twgmjc

- Rodrik, D. (2014). of Economic Growth. In *Growth (Lakeland)* (Vol. 57, Issue 3). <https://doi.org/10.2753/0577-5132570301>
- Russo, R. D. F. S. M., & Camanho, R. (2015). Criteria in AHP: A systematic review of literature. *Procedia Computer Science*, 55(I tqm), 1123–1132. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.081>
- Saaty, T. L. (2013). The modern science of multicriteria decision making and its practical applications: The AHP/ANP approach. *Operations Research*, 61(5), 1101–1118. <https://doi.org/10.1287/opre.2013.1197>
- Satrianto, A. (2016). Analisis Determinan Defisit Anggaran dan Utang Luar Negeri di Indonesia. Universitas Negeri Padang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Taylor, B. W. (2013). Introduction to Management Science. In *Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME* (11th ed., Vol. 83, Issue 3). <https://doi.org/10.1115/1.3664513>
- Tielung, M., & Wibowo, S. W. (2016). Analytical Hierarchy Process (AHP) Approach on Customer Preference in Franchise Fast Food Restaurant Selection in Manado City. *EMBA*, 4(2), 22–28.
- Trang, N. T. N., Tho, T. N., & Hong, D. T. T. (2017). The impact of oil price on the growth, inflation, unemployment and budget deficit of Vietnam. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 7(3), 42–49.

Laporan

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Agustus 2020* (123 Agustus). Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2021b). Inflasi Perkembangan Indeks Harga Konsumen. In *Bps.go.id* (Vol. 19, Issue 27).
- Kementerian Keuangan. (2020). *Apbn 2020*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>

Sumber Digital

- Badan Pusat Statistik. (2021a). *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- Faqir, A. (2021). *Sepanjang 2020, Nilai Tukar Rupiah Melemah 2,66 Persen*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4468364/sepanjang-2020-nilai-tukar-rupiah-melemah-266-persen>
- Id.investing.com. (2021). *Minyak Mentah WTI Berjangka*. Id.Investing.Com. <https://id.investing.com/commodities/crude-oil-streaming-chart>

Peraturan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, Pub. L. No. 1 Tahun 2020, 2020 46 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020>.